

STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

Alif Duta Bahri
NPP. 31.0813

Asdaf Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Email: alifdutabahriid@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on recommending strategies to accelerate the reduction of stunting in Makassar City, South Sulawesi Province. **Purpose:** The aim of this research is to describe the current conditions, problems, efforts that have been undertaken, and provide recommendations for strategies to accelerate the reduction of stunting in Makassar City. **Method:** This research employs a descriptive qualitative method using the SWOT Analysis theory proposed by Freddy Rangkuti. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation. **Results:** Based on the E-PPGBM data from the Makassar City Health Office in February 2024, the prevalence of stunting in Makassar City decreased to 3.01 from 3.14 in August 2023. This indicates a reduction trend of 0.13 percentage points from the previous 3.14 percent. Comparatively, in August 2021, the prevalence was 5.25 percent, showing a decrease of 2.24 percent over the span of 3 years by the Makassar City Government. **Conclusion:** The management of stunting in Makassar City has been progressing well, as evidenced by the decrease in the prevalence of stunting each year according to E-PPGBM data from the Makassar City Health Office, although some districts have seen an increase in stunting rates. Inhibiting factors in accelerating the reduction of stunting in Makassar City include: 1. Low awareness of the importance of stunting prevention; 2. Policies that have not fully converged in providing support for stunting prevention; 3. Communication issues in promoting behavioral changes at both individual and community levels; 4. Insufficient involvement at the level of each village and district in intervening in stunting management; 5. Lack of detailed budgeting by all relevant local agencies for stunting management in Makassar City. Efforts made by the Makassar City Government include establishing the Stunting Reduction Acceleration Team (TPPS) through Mayor Regulation No. 122/2022 and Mayor's Decree No. 1215/440.1.05/2022. Additionally, there is the allocation of Village Fund (DAKEL) amounting to 50 million per village, the Healthy Kitchen initiative to combat stunting through Supplementary Feeding, and the Stunting Control Lane Program (LOPIS). The researcher's recommended strategies to accelerate the reduction of stunting in Makassar City are: 1. Increase operational budgets and improve facilities and infrastructure for the TPPS; 2. Enhance Mayor's Regulations and Decisions to facilitate and encourage sectors outside the government to participate in stunting management; 3. Disseminate information on government stunting management programs and collaborate with relevant stakeholders who can provide support based on their fields or expertise; 4. Fully support the development of new programs by the TPPS if current programs are deemed ineffective and inefficient.

Keywords: Strategy, Acceleration of Reduction, Stunting

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Penulis berfokus pada rekomendasi strategi percepatan penurunan *stunting* di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan kondisi riil, permasalahan, upaya yang telah dilakukan dan memberikan rekomendasi strategi dalam percepatan penurunan *stunting* di Kota Makassar. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teori Analisis SWOT yang dikemukakan oleh Freddy Rangkuti. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan data E-PPGBM Dinas Kesehatan Kota Makassar bulan Februari 2024 menunjukkan bahwa prevalensi *stunting* di Kota Makassar turun di angka 3,01 dari 3,14 pada bulan Agustus 2023 dan tren penurunan sebesar 0,13 persen dari sebelumnya sebesar 3,14 persen dan apabila dibandingkan pada Agustus 2021 sebesar 5,25 persen, dalam 3 tahun Pemerintah Kota Makassar sudah berhasil menurunkan sebesar 2,24 persen. **Kesimpulan:** Penanganan *stunting* di Kota Makassar sudah berjalan dengan baik dibuktikan dengan turunnya angka prevalensi *stunting* setiap tahunnya menurut data E-PPGBM Dinkes Kota Makassar meskipun masih ada beberapa Kecamatan yang bertambah angka *stunting* nya. Faktor penghambat dalam percepatan penurunan *stunting* di Kota Makassar yakni: 1. Masih rendahnya kesadaran tentang pentingnya pencegahan *stunting*; 2. Kebijakan yang belum sepenuhnya konvergen dalam memberikan dukungan-dukungan terhadap pencegahan *stunting*; 3. Permasalahan Komunikasi dalam perubahan perilaku baik di tingkat individu maupun tingkat masyarakat; 4. Masih kurangnya peran di setiap kelurahan dan kecamatan dalam mengintervensi penanganan *stunting*; 5. Penganggaran masih belum terinci secara jelas oleh seluruh perangkat daerah terkait penanganan *stunting* di Kota Makassar. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar adalah membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* atau TPPS melalui Perwali Kota Makassar Nomor 122 Tahun 2022 dan SK Wali Kota Makassar Nomor 1215/440.1.05 Tahun 2022. Kemudian adanya penganggaran Dana Kelurahan (DAKEL) sebesar 50 juta per kelurahan, kemudian ada Dapur Sehat atasi *Stunting* melalui PMT, dan program Lorong Pengendali *Stunting* (LOPIS). Rekomendasi strategi yang peneliti berikan dalam percepatan penurunan *stunting* di Kota Makassar adalah sebagai berikut: 1. Menambah anggaran operasional serta sarana dan prasarana Tim Percepatan Penurunan *Stunting* atau TPPS; 2. Memperbaiki Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sehingga mempermudah dan memfasilitasi sektor diluar Pemerintah untuk berpartisipasi dalam penanganan *stunting*; 3. Menyebarluaskan informasi program penanganan *stunting* pemerintah dan menjalin kerjasama kepada *stakeholder* terkait yang bisa mendukung sesuai dengan bidang atau keahliannya; 4. Mendukung secara penuh pembuatan program baru oleh Tim Percepatan Penurunan *Stunting* atau TPPS apabila program sekarang dirasa tidak efektif dan efisien.

Kata kunci: Strategi, Percepatan Penurunan, *Stunting*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara global berdasarkan laporan 2018 Global Nutrition Report oleh Badan Pangan Dunia atau FAO (Food and Agriculture Organization) menunjukkan penduduk di dunia mengalami tiga beban (*triple burden*) gizi buruk yaitu *Stunting*, Anemia dan Obesitas. Dalam Konferensi Tahunan Dana Crawford di Canberra Australia disebutkan pada pertengahan 2018 sekitar 41 negara di dunia mengalami *triple burden* ini. Ada kenaikan sekitar 41% dibanding tahun 2017 yang hanya 29 negara. Di negara Papua Nugini, Myanmar, dan Buthan *triple burden* ini menjadi titik krisis (Cornish, 2018).

Stunting atau pertumbuhan fisik anak yang terhambat menjadi satu dari tiga isu penting kesehatan di Indonesia. Pada tahun 2017 Indonesia merupakan negara nomor urut kelima

terbanyak kasus stunting. Banyaknya anak yang stunting mengancam kualitas Sumber Daya Manusia di masa yang akan datang. Artinya pada 10 tahun ke depan daya saing manusia Indonesia menjadi terancam, karena anak dengan kondisi *stunting* cenderung memiliki intelegensi rendah.

Permasalahan stunting sangat berkaitan dengan masalah gizi masyarakat. Penanganan stunting membutuhkan kerjasama lintas sektor atau bukan hanya sektor kesehatan saja tetapi melibatkan sektor sosial, ekonomi, bahkan pertanian yang mengurus masalah pangan. Untuk itu berbagai kebijakan telah dibuat pemerintah dalam rangka menurunkan angka stunting di Indonesia (Heryana, 2020).

Pemerintah Indonesia telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional. Komitmen ini terwujud dalam masuknya stunting ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 dengan target penurunan yang cukup signifikan dari kondisi 27,6 % pada tahun 2019 diharapkan menjadi 14 % pada tahun 2024. Sebelumnya Presiden RI telah menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dibawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) sebagai koordinator atau Ketua Pelaksana percepatan penurunan stunting di Indonesia (bkkbn.go.id, 2023).

Awal Agustus 2021, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Peraturan ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mempercepat pencapaian target penurunan stunting menjadi 14 persen pada 2024, sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Perpres ini juga memperkuat penerapan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting 2018-2024 yang bertujuan untuk menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi. Implementasi Perpres ini, selain bertujuan untuk meningkatkan komitmen pemerintah untuk perbaikan gizi, utamanya penurunan stunting, juga bertepatan dengan satu dekade bergabungnya Indonesia dengan gerakan global Scaling Up Nutrition (SUN) sejak 2011, dengan fokus pada upaya pengentasan masalah gizi melalui keterlibatan lintas sektor.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kesenjangan yang pertama, belum berhasilnya percepatan penurunan stunting di Kota Makassar berdasarkan data E-PPGBM Dinas Kesehatan Kota Makassar bulan Februari 2024 menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Kota Makassar di angka 3,01. Kesenjangan yang kedua, Kota Makassar sebagai kota terbesar ke-5 di Indonesia menurut BPS pada tahun 2023 yang apabila stunting tidak bisa diatasi maka akan mempengaruhi pembangunan di Kota Makassar. Kesenjangan yang ketiga, Target Makassar Zero Stunting pada tahun 2024 dapat tidak tercapai apabila Pemerintah Kota Makassar tidak bekerjasama dengan baik bersama pihak terkait dalam penanganan percepatan penurunan stunting di Kota Makassar.

Kepemimpinan kolaboratif diperlukan ketika penyelenggaraan pemerintahan melibatkan banyak aktor dan bersifat lintas sektor maupun lintas batas. Saling berbagi informasi, tanggungjawab, menyadari keterbatasan yang dimiliki masing-masing dan memaksimalkan kewenangan yang dimiliki membutuhkan tipe kepemimpinan yang mampu mengakomodasi kesemua itu demi untuk mencapai tujuan bersama yaitu pelayanan terbaik bagi masyarakat. Kepemimpinan kolaboratif adalah proses, mekanisme maupun sifat yang yang diperlukan oleh kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya. (Wargadinata, 2017)

Semangat menurunkan angka stunting di Indonesia terus digalakkan berbagai pemimpin daerah, salah satunya adalah Pemerintah Kota Makassar. Pemerintah Kota Makassar menargetkan zero stunting pada tahun 2024 untuk anak-anak di wilayahnya. Wakil Walikota

Makassar Fatmawati Rusdi mengaku angka stunting di Makassar setiap tahunnya selalu turun dan merupakan yang paling rendah di Provinsi Sulawesi Selatan, sebesar 18,8 persen msar enurut data SSGI tahun 2021. Dengan data tersebut, Wakil Walikota mengajak agar masyarakat lebih bersemangat lagi untuk mencapai angka zero stunting di Makassar. Aksi nyata untuk terus menurunkan stunting, salah satunya adalah Gerebek Stunting. Dengan program ini, Wakil Walikota Makassar bersama stakeholder yang lain ikut turun memantau stunting pada Puskesmas yang ada di Kota Makassar (stunting.go.id, 2022).

Berdasarkan Data Stunting Tingkat Kecamatan, Kota Makassar (Data E-PPGBM Februari dan Agustus Tahun 2023), prevalensi stunting Kota Makassar di 15 Kecamatan pada bulan Februari 2023 sebesar 3,69% secara umum mengalami penurunan sebesar 0,57 persen menjadi 3,12% pada bulan Agustus 2023. Namun, terdapat 3 kecamatan yang mengalami penambahan jumlah anak stunting yakni Mamajang, Wajo dan Mariso (E-PPGBM, 2023).

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian terdahulu yang membahas tentang penanganan *stunting* di beberapa wilayah di Indonesia. Penelitian oleh Dhea J.P. dengan judul Skripsi “Strategi Pencegahan Stunting di Kecamatan Medan Timur Kota Medan” mengatakan bahwa program D’GINTING sebagai strategi pencegahan stunting di Kecamatan Medan Timur. Program D’GINTING yang berfokus pada perbaikan gizi dan nutrisi balita stunting, sehingga kegiatan yang ada pada program tersebut seperti, pemberian makanan tambahan, vitamin, susu, obat-obatan, sosialisasi, penyuluhan, dan pengecekan tinggi dan berat badan secara rutin, dengan rentang waktu tiga bulan dan pelaksanaannya hanya 14 hari di setiap bulannya (Dhea J.P., 2023).

Penelitian oleh Qori Hidayasa, Fitri Kurnianingsih, Agus Hendrayady dengan judul Jurnal “Collaborative Governance dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bintan” juga mengkaji masalah Percepatan Penurunan Stunting melalui teori Collaborative Governance yang menunjukkan bahwa telah dilakukannya proses kolaborasi antara pemerintah daerah yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) bersama TP.PKK dan PT. BIIE. Hasil akhir dari kolaborasi ini menunjukkan trend penurunan dari kasus stunting yang awalnya mencapai 569 kasus pada tahun 2021 turun menjadi 383 pada tahun 2022. Hanya saja perlu ditekankan upaya dalam membangun kepercayaan bersama masyarakat serta pemahaman dari para pemangku kepentingan dalam memahami tupoksi tugas masing-masing (Hidayasa Q., dkk, 2023).

Kemudian dijelaskan lebih rinci pada penelitian Arsyi Ananda Putri dan Diana Hertati dengan judul Jurnal “Kolaborasi Model Pentahelix dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Jombang” bahwa Kolaborasi Model Pentahelix dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Jombang telah terlaksana dengan baik. Kolaborasi dilakukan oleh lima unsur pentahelix, yaitu akademisi, bisnis, komunitas masyarakat, pemerintah, dan media. Bappeda sebagai leading sector mengkoordinasikan unsur-unsur pentahelix dengan baik melalui rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan rutin, baik rapat koordinasi dalam skala besar yang mengundang semua unsur pentahelix maupun rapat kecil yang hanya melibatkan unsur pentahelix yang berkepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kontinuitas yang dialami oleh kelima unsur cenderung stabil karena setiap unsur melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing (Putri A. A. & Hertati D., 2023).

Penelitian oleh Fatris Rudmini dengan judul Skripsi “Strategi Dinas Kesehatan dalam Penanggulangan Prevalensi Stunting pada Anak Balita di Kabupaten Simeulue” menjelaskan Program yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Simeulue yakni pelaksanaan strategi (implementasi kebijakan) yang telah direncanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue, masih terbatas pada penyelenggaraan edukasi dan pelatihan pada tenaga kerja kesehatan di tingkat Dinas Kesehatan, Kader Posyandu dan Puskesmas. Edukasi tersebut

dilakukan dengan bekerja sama dengan UNICEF. Kendala yang menjadi sebab tidak dapat terselenggarakannya seluruh strategi Dinkes dalam penanggulangan stunting yaitu, terbatasnya sumber pendanaan (Rudmini, F., 2021).

Penelitian oleh Rini Archda Saputri dan Jeki Tumangger dengan judul Jurnal “Hulu-hilir Penanggulangan Stunting di Indonesia” menjelaskan bahwa Persoalan stunting adalah isu yang sangat mendesak untuk segera ditangani secara serius karena menyangkut kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan dan sangat memengaruhi eksistensi negara. Di level kebijakan, pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan program-program terkait upaya percepatan penanggulangan stunting dan disertai dengan anggaran yang cukup besar. Namun disatu sisi, di level masyarakat upaya percepatan penurunan stunting yang digadang-gadang tersebut belum dirasakan manfaatnya secara optimal. Bahkan, masih ditemukan implementer program di tingkat masyarakat yang belum memiliki pemahaman yang baik tentang stunting itu sendiri. Terlebih lagi di masyarakat, masih banyak sekali masyarakat yang asing mendengar istilah stunting. Hal ini menjadi persoalan tersendiri sebab anak stunting menjadi sulit terdeteksi karena tidak disadari. Maka, salah satu strategi utama yang perlu dilakukan adalah dengan mengkampanyekan isu stunting secara komprehensif dan massif, baik melalui media masa, maupun melalui komunikasi dan sosialisasi kepada keluarga, terutama kaum perempuan (ibu dan calon ibu), serta melakukan advokasi secara berkelanjutan (Saputri, R., & Tumangger, J., 2019).

Penelitian oleh Demsa Simbolon, Desri Suryani, Epti Yorita dengan judul Jurnal “Model Prediksi dan Sistem Skoring Pencegahan dan Penanggulangan Stunting pada Balita di Indonesia” menjelaskan bahwa Model prediksi menunjukkan bahwa faktor risiko yang berhubungan dengan stunting balita adalah berat lahir, paritas, jenis kelamin, umur ibu saat melahirkan, tinggi badan ibu, kelengkapan imunisasi, pendidikan ibu, tempat tinggal keluarga dan jumlah tablet Fe yang dikonsumsi ibu selama hamil. Faktor risiko dominan yang berhubungan dengan stunting adalah berat BBLR dan ibu pendek. Upaya intervensi stunting difokuskan pada perbaikan faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Metode skoring memperoleh *Cut Off Point* > 13,5 sebagai deteksi risiko stunting dengan nilai sensitifitas 61,9% dan spesifisitas 60,9%, nilai *Area Under the Curve* 65,5%. Sehingga model ini dapat direkomendasikan untuk digunakan dalam memprediksi stunting pada balita di Indonesia. Pemerintah perlu melakukan upaya perencanaan, pencegahan, promosi dan intervensi khususnya dalam penanggulangan stunting, seperti pendampingan ibu hamil dengan tinggi badan yang rendah dan kehamilan usia remaja sebagai kelompok risiko tinggi dan pencegahan serta penatalaksanaan pada bayi lahir dengan BBLR untuk mencegah stunting. Perhatian khusus pada ibu pendidikan rendah melalui peningkatan pengetahuan dengan mengoptimalkan kelas ibu hamil, pemantauan kesehatan pada ibu hamil dengan paritas grandemultipara. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan pada balita tinggal dipedesaan sehingga balita mendapatkan imunisasi dasar lengkap dan ibu hamil mendapatkan dan mengkonsumsi tablet Fe dengan jumlah yang cukup (Simbolon D., dkk, 2019).

Penelitian oleh Latifa Suhada Nisa dengan judul Jurnal “Kebijakan Penanggulangan Stunting di Indonesia” menjelaskan bahwa berdasarkan paparan dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia masih tergolong ke dalam negara dengan prevalensi stunting yang tinggi, yaitu sekitar 36%. Di sisi lain pemerintah Indonesia telah memiliki sejumlah kebijakan dan regulasi terkait penang-gulangan masalah stunting, di mana upaya yang dilakukan meliputi intervensi spesifik yang dilakukan oleh sektor kesehatan, dan intervensi sensitif yang dilakukan oleh lintas sektor di luar kesehatan. Faktor sosial ekonomi yang berpengaruh terhadap stunting, diantaranya masalah kemiskinan, tingkat pendidikan, dan pendapatan keluarga yang rendah (Nisa, L., 2020).

Penelitian oleh Erika Nur Khasanah, Dini Gandini Purbaningrum, Citra Andita, Dwi Ayu Setiani dengan judul Jurnal “Kebijakan Penanggulangan Stunting Di Indonesia” menjelaskan

bahwa masalah stunting merupakan permasalahan gizi yang sampai saat ini masih di hadapi dunia khususnya di Indonesia. Stunting merupakan gagal tumbuh akibat adanya akumulasi ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung lama mulai dari kehamilan sampai dengan usia 24 bulan. Banyak factor yang menyebabkan terjadinya stunting pada balita. Masyarakat masih belum menyadari stunting sebagai salah satu masalah jika dibandingkan dengan permasalahan kurang gizi lainnya. Indonesia masih masuk ke dalam kategori negara yang memiliki prevalensi stunting yang tinggi yakni sekitar 24%. Di sisi lain pemerintah telah menerapkan adanya beberapa kebijakan tentang penanggulangan stunting dimana penanganannya difokuskan pada kelompok 1000 hari pertama kehidupan dan meliputi intervensi gizi spesifik yang dilakukan oleh sector Kesehatan dan intervensi gizi sensitive yang dilakukan di lintas sector Kesehatan (Khasanah, E., dkk, 2023).

Penelitian oleh Melika Inda Panigoro, Andi Akifa Sudirman, Dewi Modjo dengan judul Jurnal “Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Stunting pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Tilongkabila” menjelaskan bahwa hasil penelitian ini bertujuan untuk gambaran upaya pencegahan dan penanggulangan stunting pada balita di Puskesmas Tilongkabila yaitu upaya pencegahan kategori cukup 36 responden (36,4%), kategori baik 32 responden (32,3%), dan 31 responden (31,3%) kategori kurang. Penanggulangan kategori baik 79 responden (79,8%), kategori cukup 5 responden (5,1%), kategori kurang 15 responden (15,2%). Jadi gambaran upaya pencegahan kategori cukup dan penanggulangan kategori baik (Panigoro, M., dkk, 2023).

Penelitian oleh Rati Sumanti dengan judul Jurnal “Collaborative Governance: Strategi Pencegahan dan Penurunan Prevalensi Stunting” menjelaskan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan collaborative governance dengan model pentahelix menjadi salah satu alternatif terbaik dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting di Indonesia. Perkembangan organisasi non pemerintah/civil society dan dunia usaha, kemajuan yang sangat progresif terkait teknologi informasi dan media massa serta tingkat pendidikan dan kepedulian masyarakat yang makin tinggi telah menciptakan peluang bagi pemerintah untuk mengajak mereka bersama-sama berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan publik yang sedang terjadi. Jika pemerintah mampu memanfaatkan dengan baik peluang besar tersebut, maka akan menjadi sumber kekuatan untuk mencapai target prevalensi stunting sampai 14,0% pada tahun 2024 (Sumanti, R., 2024).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni rekomendasi strategi yang dilakukan dalam percepatan penurunan *stunting* oleh Pemerintah Kota Makassar. Metode yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menjelaskan rekomendasi strategi dalam percepatan penurunan *stunting* di Kota Makassar melalui teori Analisis SWOT yang dikemukakan oleh Freddy Rangkuti (2017) yang diperoleh dari matriks IFAS (*Internal Factory Analysis Summary*) dan EFAS (*External Factory Analysis Summary*).

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi riil, mengetahui permasalahan, mengetahui upaya yang telah dilakukan dan memberikan rekomendasi strategi dalam percepatan penurunan *stunting* di Kota Makassar.

II. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif. Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif disebabkan oleh kesesuaian metode

ini dalam mengungkapkan fenomena atau fakta terkait permasalahan kependudukan di masyarakat Kota Makassar.

Menurut Leavy P. (2017), penelitian kualitatif lebih condong kepada pendalaman makna serta pengalaman subjektif seseorang yang diharapkan dapat membangun pemahaman yang kuat tentang topik. Sedangkan menurut Fadli (2021), penelitian Kualitatif adalah studi yang meneliti suatu kualitas hubungan, aktivitas, atau berbagi material dimana penelitiannya lebih di tekankan kepada deskripsi holistik untuk menjelaskan secara lengkap mengenai atau fenomena yang sedang berlangsung.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam pengumpulan data wawancara penulis melakukan wawancara langsung dengan 5 informan yang terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar, Kepala Bidang Sosbud dan Pemerintahan Umum Bappeda Kota Makassar, Satgas *Stunting* Kota Makassar, dan Camat Mamajang Kota Makassar.

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu diawali dengan pengumpulan data melakukan *re-check* data, setelah melakukan *re-check* data maka dilakukan *organizing* data, dan melakukan pemberian *coding*. Setelah pemberian *coding* maka kode dibaca dengan reduksi data dan verifikasi data dan tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Kemudian ditambah dengan Teknik Analisis SWOT yang menilai antara faktor luar organisasi (peluang dan ancaman) dengan faktor dalam organisasi (kekuatan dan kelemahan). Faktor Internal juga termasuk ke dalam matriks yang disebut matriks faktor strategi internal atau IFAS (*Internal Strategic Factor Analisis Summary*) sedangkan faktor dari luar organisasi termasuk ke dalam matriks yang disebut matriks faktor strategi eksternal atau EFAS (*External Strategic Factor Analisis Summary*) (Rangkuti, 2017).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Penanganan *Stunting* di Kota Makassar

Tabel 3.1
Trend *stunting* Kota Makassar 2021-Februari 2024

| NO | KECAMATAN | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | Feb-24 | | |
|----|---------------|-----------------|-------|-----------------|------|-------|-----------------|------|-------|-----------------|------|-------|
| | | <i>Stunting</i> | % | <i>Stunting</i> | % | TREND | <i>Stunting</i> | % | TREND | <i>Stunting</i> | % | TREND |
| 1 | MARISO | 44 | 1,70 | 77 | 2,15 | ↑0.45 | 90 | 2,86 | ↑0.71 | 84 | 2,68 | ↓0.18 |
| 2 | MAMAJANG | 96 | 3,56 | 87 | 3,26 | ↓0.3 | 110 | 3,42 | ↑0.16 | 46 | 1,55 | ↓1.87 |
| 3 | TAMALATE | 242 | 3,09 | 681 | 6,52 | ↑3.43 | 487 | 4,04 | ↓2.48 | 425 | 3,60 | ↓0.44 |
| 4 | RAPPOCINI | 333 | 6,96 | 354 | 7,34 | ↑0.38 | 251 | 3,81 | ↓3.53 | 267 | 3,85 | ↑0.04 |
| 5 | MAKASSAR | 177 | 6,27 | 47 | 0,94 | ↓5.33 | 72 | 1,53 | ↑0.58 | 96 | 2,27 | ↑0.74 |
| 6 | UJUNG PANDANG | 33 | 2,43 | 40 | 2,80 | ↑0.37 | 6 | 0,56 | ↓2.24 | 0 | 0,00 | ↓0.56 |
| 7 | WAJO | 16 | 1,70 | 54 | 5,33 | ↑3.63 | 32 | 2,60 | ↓2.73 | 30 | 2,62 | ↑0.02 |
| 8 | BONTOALA | 288 | 8,42 | 217 | 6,52 | ↓1.9 | 185 | 5,98 | ↓0.54 | 156 | 5,46 | ↓0.52 |
| 9 | UJUNG TANAH | 48 | 2,21 | 81 | 3,57 | ↑1.36 | 52 | 2,59 | ↓0.98 | 50 | 2,54 | ↓0.05 |
| 10 | SANGKARRANG | 117 | 11,78 | 90 | 8,09 | ↓3.69 | 67 | 5,85 | ↓2.24 | 67 | 6,80 | ↑0.95 |
| 11 | TALLO | 534 | 6,26 | 366 | 4,51 | ↓1.75 | 354 | 4,05 | ↓0.46 | 316 | 3,63 | ↓0.42 |
| 12 | PANAKKUKANG | 234 | 2,25 | 344 | 3,09 | ↑0.84 | 287 | 2,36 | ↓0.73 | 306 | 2,57 | ↑0.21 |
| 13 | MANGGALA | 175 | 2,69 | 195 | 3,10 | ↑0.41 | 228 | 2,97 | ↓0.13 | 272 | 3,27 | ↑0.30 |
| 14 | BIRINGKANAYA | 752 | 6,43 | 605 | 4,63 | ↓2.07 | 423 | 3,27 | ↓1.36 | 407 | 3,18 | ↓0.09 |
| 15 | TAMALANREA | 823 | 10,63 | 95 | 1,30 | ↓9.33 | 90 | 1,22 | ↓0.08 | 72 | 0,98 | ↓0.24 |
| | KOTA MAKASSAR | 3912 | 5,25 | 3333 | 4,06 | ↓1.17 | 2734 | 3,14 | ↓0.92 | 2594 | 3,01 | ↓0.13 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, 2024

Dari Tabel 3.1 dapat disimpulkan bahwa pengukuran data terbaru pada bulan Februari 2024 menunjukkan bahwa prevalensi *stunting* di Kota Makassar turun di angka 3,01 dari 3,14

pada bulan Agustus 2023 dan tren penurunan sebesar 0,13 persen dari sebelumnya sebesar 3,14 persen dan apabila dibandingkan pada Agustus 2021 sebesar 5,25 persen, dalam 3 tahun Pemerintah Kota Makassar sudah berhasil menurunkan sebesar 2,24 persen.

3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Strategi Pemerintah Kota Makassar dalam Percepatan Penurunan *Stunting*

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan mengkomparasikan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan, maka peneliti menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan strategi Pemerintah Kota Makassar dalam percepatan penurunan *stunting* ialah sebagai berikut:

- 1) Masih rendahnya kesadaran tentang pentingnya pencegahan *stunting*
- 2) Kebijakan yang belum sepenuhnya konvergen dalam memberikan dukungan-dukungan terhadap pencegahan *stunting*
- 3) Permasalahan Komunikasi dalam perubahan perilaku baik di tingkat individu maupun tingkat masyarakat
- 4) Masih kurangnya peran di setiap kelurahan dan kecamatan dalam mengintervensi penanganan *stunting*
- 5) Penganggaran harus lebih jelas oleh seluruh perangkat daerah terkait penanganan *stunting* di Kota Makassar

3.3 Upaya yang Dilakukan Pemerintah Kota Makassar dalam Percepatan Penurunan *Stunting*

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar adalah membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* atau TPPS melalui Peraturan Walikota Makassar Nomor 122 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah dan Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 1215/440.1.05 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Makassar Tahun 2022. Kemudian adanya penganggaran Dana Kelurahan di setiap kelurahan (DAKEL) yang dikhususkan untuk penanganan *stunting* sebesar 50 juta per kelurahan, kemudian ada Dapur Sehat atasi *Stunting* melalui Pemberian Makanan Tambahan, dan program Lorong Pengendali *Stunting* (LOPIS).

3.4 Rekomendasi Strategi Pemerintah Kota Makassar dalam Percepatan Penurunan *Stunting*

Tabel 3.2
Matriks IFAS

| FAKTOR-FAKTOR STRATEGI INTERNAL | BOBOT | RATING | BOBOT x RATING |
|--|-------------|--------|----------------|
| KEKUATAN: | | | |
| • Adanya Peraturan Wali Kota dan Keputusan Wali Kota | 0,2 | 3 | 0,6 |
| • Dukungan kebijakan anggaran | 0,2 | 4 | 0,8 |
| • Program terkait penanganan <i>stunting</i> | 0,2 | 3 | 0,6 |
| KELEMAHAN: | | | |
| • Keterbatasan SDM | 0,2 | 2 | 0,4 |
| • Lemahnya koordinasi antar OPD terkait | 0,2 | 2 | 0,4 |
| TOTAL | 1,00 | | 2,8 |

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2024

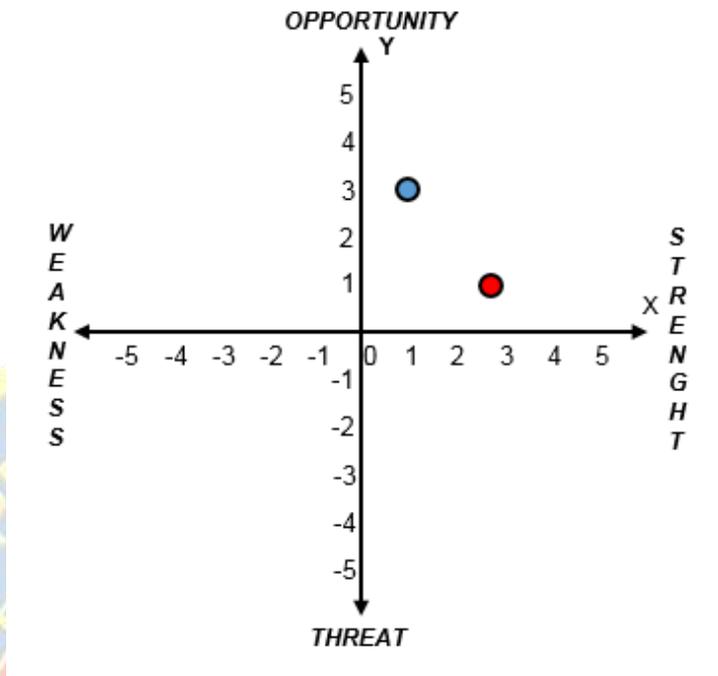
Tabel 3.3
Matriks EFAS

| FAKTOR-FAKTOR STRATEGI EKSTERNAL | BOBOT | RATING | BOBOT x RATING |
|---------------------------------------|-------------|--------|----------------|
| PELUANG: | | | |
| • Kerjasama lintas sektor | 0,2 | 3 | 0,6 |
| • Terbentuknya TPPS | 0,2 | 4 | 0,8 |
| • Dukungan <i>stakeholder</i> terkait | 0,2 | 3 | 0,6 |
| ANCAMAN: | | | |
| • Tingkat kemiskinan | 0,2 | 2 | 0,4 |
| • Kesadaran masyarakat masih kurang | 0,2 | 3 | 0,6 |
| TOTAL | 1,00 | | 3,0 |

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2024

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan melalui skoring IFAS dan EFAS maka didapatkan nilai x dan nilai y, oleh sebab itu hasil tersebut dapat menentukan arah strategis Pemerintah Kota Makassar. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa Sumbu X berada pada titik 2,8 sedangkan Sumbu Y berada pada titik 3,0 sehingga dapat digambarkan melalui kuadran SWOT untuk mengetahui posisi dalam menentukan strategi percepatan penurunan *stunting* di Kota Makassar sebagai berikut.

Gambar 3.1
Kuadran SWOT



Sumber: Diolah oleh Penulis, 2024

Dari gambar di atas, posisi percepatan penurunan stunting berada pada kuadran I (progresif) yang berarti bahwa kondisi percepatan penurunan stunting mempunyai berbagai macam peluang dalam pelaksanaan strategi dengan menggunakan kekuatan yang ada pada organisasi. Setelah mempelajari hasil Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threat) dan penjelasan Kuadran I, Kuadran II, Kuadran III dan Kuadran IV, maka dapat ditentukan matriks SWOT sebagai rumusan strategi percepatan penurunan stunting di Kota Makassar.

Posisi Pemerintah Kota Makassar yang berada pada Kuadran I, menunjukkan bahwa dalam letak matriks SWOT menggunakan strategi S-O. Strategi S-O ini adalah kombinasi antara Kekuatan (Strength) dan Peluang (Opportunity), dimana Pemerintah Kota Makassar dapat meningkatkan pengembangan organisasi dengan menggunakan Kekuatan untuk menangkap Peluang yang sebanyak-banyaknya. Berikut merupakan hasil dari analisis matriks SWOT strategi S-O.

Tabel 4.6
Matriks SWOT S-O

| | |
|---|--|
| <p>IFAS</p> <p>EFAS</p> | <p>STRENGTH (Kelemahan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota 2. Dukungan kebijakan anggaran 3. Program terkait penanganan <i>stunting</i> |
| <p>OPPORTUNITY (Peluang)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama lintas sektor 2. Terbentuknya TPPS 3. Dukungan <i>stakeholder</i> terkait | <p>STRATEGI S-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menambah anggaran operasional serta sarana dan prasarana Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> atau TPPS. (S2-O2) 2. Memperbaiki Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sehingga mempermudah dan memfasilitasi sektor diluar Pemerintah untuk berpartisipasi dalam penanganan <i>stunting</i>. (S1-O1) 3. Menyebarluaskan informasi program penanganan <i>stunting</i> pemerintah dan menjalin kerjasama kepada <i>stakeholder</i> terkait yang bisa mendukung sesuai dengan bidang atau keahliannya. (S3-O3) 4. Mendukung secara penuh pembuatan program baru oleh Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> atau TPPS apabila program sekarang dirasa tidak efektif dan efisien. (S3-O2) |

Berikut adalah rumusan strategi S-O yang peneliti ajukan dalam rangka strategi Pemerintah Kota Makassar dalam percepatan penurunan *stunting* di Kota Makassar berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi internal dan eksternal yang diambil melalui wawancara dan observasi secara langsung, dapat ditarik kesimpulan, yakni:

1. Menambah anggaran operasional serta sarana dan prasarana Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS. (S2-O2)

Dukungan kebijakan anggaran penting karena dapat membantu menetapkan skala prioritas dan alokasi sumber daya yang efisien untuk mendukung percepatan penurunan stunting. Tanpa dukungan anggaran operasional yang memadai, dapat mempengaruhi optimalisasi penggunaan sumber daya dan mengurangi persentase keberhasilan dalam mencapai target percepatan penurunan stunting.

2. Memperbaiki Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sehingga mempermudah dan memfasilitasi sektor diluar Pemerintah untuk berpartisipasi dalam penanganan stunting. (S1-O1)

Dukungan dalam pembuatan regulasi sangat penting karena regulasi memberikan kerangka kerja yang jelas dan tata kelola untuk percepatan penurunan stunting. Regulasi yang baik dapat membantu mengatur proses, menetapkan standar keamanan dan kualitas, serta menjaga kepatuhan terhadap aturan hukum dan etika. Dengan adanya regulasi yang kuat, percepatan penurunan stunting dapat berjalan lebih terstruktur, aman, dan memberikan kemudahan sektor di luar pemerintah dalam berpartisipasi.

3. Menyebarkan informasi program penanganan stunting pemerintah dan menjalin kerjasama kepada stakeholder terkait yang bisa mendukung sesuai dengan bidang atau keahliannya. (S3-O3)

Dengan penyebaran informasi program penanganan stunting oleh pemerintah akan memberi akses kepada stakeholder terkait untuk dapat mengetahui program pemerintah, mempromosikan transparansi kegiatan, dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Ketika informasi disebarluaskan, individu dan kelompok memiliki kesempatan untuk memahami program-program pemerintah, mengambil tindakan yang sesuai, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan sesuai dengan bidang atau keahliannya. Selain itu, penyebaran informasi juga membantu mencegah penyebaran disinformasi dan memperkuat peran stakeholder terkait dalam pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

4. Mendukung secara penuh pembuatan program baru oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS apabila program sekarang dirasa tidak efektif dan efisien. (S3-O2)

Pembuatan program baru ketika program yang dijalankan sekarang dirasa tidak efektif dan efisien penting karena memungkinkan untuk mengidentifikasi kebutuhan baru, mengadaptasi solusi yang lebih relevan, dan meningkatkan persentase keberhasilan percepatan penurunan stunting. Dengan mengakui bahwa program yang ada tidak lagi dapat memenuhi tujuan atau memenuhi kebutuhan dengan baik, pembuatan program baru memberikan kesempatan untuk merancang pendekatan yang lebih tepat, mengintegrasikan pembelajaran dari program percepatan penurunan stunting, dan memperbaiki kelemahan yang ada. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara efisien dan untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan lebih baik dari sebelumnya.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penanganan *stunting* di Kota Makassar sudah berjalan dengan baik dibuktikan dengan turunnya angka prevalensi *stunting* setiap tahunnya menurut data E-PPGBM Dinkes Kota Makassar bahwa pengukuran data terbaru pada bulan Februari 2024 menunjukkan bahwa prevalensi *stunting* di Kota Makassar turun di angka 3,01 meskipun masih ada beberapa Kecamatan yang bertambah angka *stunting* nya.

Pemerintah Kota Makassar jangan dulu merasa puas atas pencapaian tersebut karena Pemerintah Kota Makassar mempunyai target Makassar *Zero Stunting* pada tahun 2024 sehingga Penulis berusaha memberikan sumbangsih kepada tanah kelahiran dengan membantu memberikan rekomendasi strategi yang didasarkan kepada analisis faktor-faktor internal dan eksternal dalam penanganan *stunting* menggunakan teori Analisis SWOT Freddy Rangkuti sehingga dapat membantu dalam percepatan penurunan dan membantu Pemerintah Kota Makassar dalam mencapai target Makassar *Zero Stunting* pada tahun 2024.

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat dalam penanganan *stunting* yakni masyarakat masih belum mengetahui perbedaan antara anak yang pertumbuhannya normal dengan anak yang mengalami *stunting* serta masyarakat masih menganggap bahwa anak yang mengalami *stunting* itu bukan suatu hal yang harus dikhawatirkan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui hasil wawancara serta data-data yang diperoleh selama penelitian, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penanganan *stunting* di Kota Makassar sudah berjalan dengan baik dibuktikan dengan turunnya angka prevalensi *stunting* setiap tahunnya menurut data E-PPGBM Dinkes Kota Makassar meskipun masih ada beberapa Kecamatan yang bertambah angka *stunting* nya.
2. Faktor penghambat dalam percepatan penurunan *stunting* di Kota Makassar yakni masih rendahnya kesadaran tentang pentingnya pencegahan *stunting*, kebijakan yang belum sepenuhnya konvergen dalam memberikan dukungan-dukungan terhadap pencegahan *stunting*, permasalahan Komunikasi dalam perubahan perilaku baik di tingkat individu maupun tingkat masyarakat, masih kurangnya peran di setiap kelurahan dan kecamatan dalam mengintervensi penanganan *stunting*, penganggaran masih belum terinci secara jelas oleh seluruh perangkat daerah terkait penanganan *stunting* di Kota Makassar.
3. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar adalah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS melalui Peraturan Walikota Makassar Nomor 122 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Daerah dan Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 1215/440.1.05 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kota Makassar Tahun 2022. Kemudian adanya penganggaran Dana Kelurahan di setiap kelurahan (DAKEL) yang dikhususkan untuk penanganan *stunting* sebesar 50 juta per kelurahan, kemudian ada Dapur Sehat atasi Stunting melalui Pemberian Makanan Tambahan, dan program Lorong Pengendali Stunting (LOPIS).
4. Rekomendasi strategi yang peneliti berikan dalam percepatan penurunan *stunting* di Kota Makassar adalah sebagai berikut:
 1. Menambah anggaran operasional serta sarana dan prasarana Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS.
 2. Memperbaiki Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sehingga mempermudah dan memfasilitasi sektor diluar Pemerintah untuk berpartisipasi dalam penanganan *stunting*.
 3. Menyebarkan informasi program penanganan *stunting* pemerintah dan menjalin kerjasama kepada stakeholder terkait yang bisa mendukung sesuai dengan bidang atau keahliannya.
 4. Mendukung secara penuh pembuatan program baru oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS apabila program sekarang dirasa tidak efektif dan efisien.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini juga hanya dilakukan pada masalah penanganan *stunting*.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian yang dilakukan oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat melakukan penelitian lanjutan yang mencakup masalah kependudukan selain *stunting* sehingga menemukan hasil yang lebih luas dan mendalam karena dalam penanganan *stunting* terdapat banyak faktor salah satunya kemiskinan dimana kemiskinan juga merupakan salah satu masalah kependudukan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar, Kepala Bidang Sosbud dan Pemerintahan Umum Bappeda Kota Makassar, Satgas *Stunting* Kota Makassar, dan Camat Mamajang Kota Makassar serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- bappenas.go.id, 27 Agustus 2021, Perpres Percepatan Penurunan Stunting untuk Perbaikan Gizi Indonesia, 10 Oktober 2023, <https://www.bappenas.go.id/id/berita/perpres-percepatan-penurunan-stunting-untuk-perbaikan-gizi-indonesia-2oPyg>
- bkkbn.go.id, 17 Februari 2021, BKKBN Mencari Strategi Percepatan Pencegahan Stunting, 10 Oktober 2023 <https://www.bkkbn.go.id/berita-bkkbn-mencari-strategi-percepatan-pencegahan-stunting>
- BKKBN. 2021. *Kebijakan dan Strategi Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia*. Jakarta: BKKBN.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. 2017. *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications
- Dhea J.P. 2023. *Strategi Pencegahan Stunting di Kecamatan Medan Timur Kota Medan*. (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area: Medan). Diakses dari <https://repositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/19733>
- Erika Nur Khasanah, Dini Gandini Purbaningrum, Citra Andita, & Dwi Ayu Setiani. (2023). Kebijakan Penanggulangan Stunting Di Indonesia. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(2), 217–231. <https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v1i2.482>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *HUMANIKA*, 21, 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fatris R. 2021. *Strategi Dinas Kesehatan dalam Penanggulangan Prevalensi Stunting pada Anak Balita di Kabupaten Simeulue*. (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh). Diakses dari <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15868/>
- Freddy Rangkuti. 2017. *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hidayasa Q, Kurnianingsih, F., & Hendrayady, A. (2023). Collaborative Governance dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bintan. 4(2), 83–90. <https://japs.ejournal.unri.ac.id/index.php/JAPS/article/view/107>
- Latifa Suhada Nisa. (2020). Kebijakan Penanggulangan Stunting Di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 13(2), 173-179. Retrieved from <https://jkpjournals.com/index.php/menu/article/view/78>
- Leavy, P. (2017). Quantitative, qualitative, mixed methods, arts-based, and community-based participatory research approaches. *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, 53(9).

- Melika Inda Panigoro, Andi Akifa Sudirman, & Dewi Modjo. (2023). UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING PADA BALITA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS TILONGKABILA. *Jurnal Ilmu Kesehatan Dan Gizi*, 1(1), 79–91. <https://doi.org/10.55606/jikg.v1i1.825>
- Putri, A. A., & Hertati, D. (2023). Kolaborasi Model Pentahelix dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Jombang. 5(3), 69–81. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/ministrate/article/view/26068>
- Saputri, R., & Tumangger, J. (2019). Hulu-hilir Penanggulangan Stunting di Indonesia. *Journal of Political Issues*, 1(1), 1-9. <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.2>
- Simbolon, D., Suryani, D., & Yorita, E. (2019). Prediction Model and Scoring System in Prevention and Control of Stunting Problems in Under Five-Year-Olds in Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 15(2), 160-170. <https://doi.org/10.15294/kemas.v15i2.13415>
- Siti Helmyati dkk. 2020. *STUNTING: Permasalahan dan Penanganannya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- stunting.go.id, 25 Juli 2022, Jalankan Gerebek Stunting, Pemkot Makassar Target Zero Stunting, 24 Oktober 2023, <https://stunting.go.id/jalankan-gerebek-stunting-pemkot-makassar-target-zero-stunting/>
- Sugiyono. 2015. *METODE PENELITIAN PENDIDIKAN (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Sumanti, R. (2024). Collaborative Governance: Strategi Pencegahan dan Penurunan Prevalensi Stunting. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 19(1), 13-26. <https://doi.org/10.47441/jkp.v19i1.361>
- Tri Siswati. 2018. *STUNTING*. Yogyakarta: Husada Mandiri.
- Wargadinata, E. (2017). Kepemimpinan Kolaboratif. Sumedang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 8(1). <https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/73>
- yankes.kemkes.go.id, 26 Agustus 2022, Mengenal Apa itu Stunting..., 10 Oktober 2023, https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1388?mengenal-apa-itu-stunting